



PERDAGANGAN PEREMPUAN VIETNAM KE TIONGKOK TAHUN 2005-2009: PERSPEKTIF FEMINISME-SOSIALIS

Dwi Ayu Lestari

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Woman trafficking in Vietnam was a transnational crime in which the victim experienced sexual exploitation, either for prostitution or forced marriage. This study aimed to explain the case of woman trafficking in Vietnam to China 2005-2009. This study employed socialist feminism theory along with qualitative methods through interviews, and literature research. This study also found that women trafficking in Vietnam caused by the culture of patriarchy in both Vietnam and China. In both countries women were considered as a second class that made them, underwent social and economic discrimination. Consequently, the vulnerability of women trafficking abroad was significantly increased.

Keywords: *woman trafficking, socialist feminism, patriarchy*

PENDAHULUAN

United Nation on Drug and Crime (UNODC) menyatakan bahwa perdagangan manusia merupakan jenis kejahatan yang termasuk kedalam *transnational organized crime* atau kejahatan transnasional yang terorganisir. UNODC mendefinisikan kejahatan ini sebagai kejahatan global dimana laki – laki, perempuan dan anak - anak dieksploitasi sebagai tenaga kerja maupun pekerja seks perdagangan manusia jelas melanggar hak asasi manusia yang dijamin baik melalui hukum internasional maupun hukum internal negara yang beradab. Meskipun target perdagangan manusia meliputi wanita, pria serta anak-anak, namun seperti yang kita ketahui, wanita lah yang rentan menjadi korban perdagangan manusia dimana secara mental maupun fisik posisi mereka lebih lemah dibandingkan pria. Seperti halnya di Vietnam perempuan sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia, terutama diperdagangkan ke Tiongkok.

Para wanita tersebut diperdagangkan dan dieksploitasi seksual baik dalam bentuk pekerja seks maupun pernikahan paksa (UNIAP, 2011). Dari tahun 2005 – 2009 tercatat 40.000 wanita dilaporkan menghilang dan kemungkinan besar mereka menjadi korban perdagangan manusia. UNODC sebagai badan PBB yang bertanggungjawab untuk memantau perdagangan manusia sendiri menyatakan sangat sulit untuk menilai ukuran nyata dari perdagangan manusia karena kejahatan terjadi di bawah tanah, dan sering tidak teridentifikasi atau salah diidentifikasi (Parren˜as, 2012:1016). Pada jangka tahun tersebut terdapat 6000 kasus perdagangan perempuan, sebanyak 3190 berhasil teridentifikasi oleh otoritas Tiongkok dan Vietnam. Jadi dari total keseluruhan kasus perdagangan perempuan, sebanyak 60% korban diperdagangkan ke Tiongkok (CEOP, 2011).

Penelitian ini bertujuan untuk penyebab terjadinya kejahatan perdagangan perempuan Vietnam ke Tiongkok dengan menggunakan kerangka teori *socialist feminism*. “*Socialist feminism focus on gender, class, and racial relations of domination*” (Ehreinrech, 1976) Di dalam teori *socialist feminism* terdapat dua tema pembahasan umum, yaitu *two system explanation of women's oppression* yang menganggap patriarki

merupakan musuh terburuk bagi perempuan dan interactive system explanations of women's oppression yang menjelaskan bahwa baik patriarki maupun kapitalis sama-sama berkontribusi terhadap penindasan terhadap perempuan.

Perdagangan perempuan Vietnam ke Tiongkok terjadi karena perempuan di Vietnam berada dalam posisi yang kurang menguntungkan akibat struktur budaya patriarki yang dianut oleh kedua negara. Struktur budaya patriarki membuat perempuan Vietnam mengalami diskriminasi baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Akibat diskriminasi tersebut mereka rentan menjadi korban perdagangan manusia. Selain itu masalah demografi di Tiongkok, yaitu ketidakseimbangan *sex ratio* juga menjadi faktor penarik terjadinya perdagangan perempuan Vietnam.

Pembahasan

Menurut TIP jumlah korban perdagangan perempuan pada rentan tahun 2005-2009 sebanyak 3290. Jumlah ini berbeda dengan jumlah korban yang berhasil diidentifikasi oleh CEOP yaitu sebanyak 6000 korban. Perbedaan data ini wajar terjadi mengingat keduanya berasal dari institusi yang berbeda. CEOP dapat mengidentifikasi bahwa jumlah korban yang diperdagangkan ke Tiongkok sebanyak 3190 perempuan.

Penyaluran korban dari Vietnam menuju Tiongkok melalui beberapa provinsi di Vietnam yang berdekatan dengan perbatasan Tiongkok, diantaranya yaitu Lao Cai, Muong Khuong (Lao Cai), Tan Thanh (Lang Song), Mong Cai (Quang Ninh). Kemudian mereka dikirim ke beberapa provinsi yang ada di Tiongkok, yaitu Yunnan, Jiangsu, Hubei, Guangxi, dan Guangdong (UNIAP, 2011: 37).

Terdapat 3 jenis perdagangan perempuan yang dijelaskan pada peta di atas, yaitu *sex trafficking*, *marriage trafficking*, *labour trafficking* dan perdagangan perempuan yang tidak terdokumentasi. Mr Le Duc Manh, *First Secretari of the Socialist Viet Nam Embassy* di Indonesiam menyatakan bahwa kebanyakan korban mengalami paksaan untuk menikah dengan pria Tiongkok, setelah menikah dan kemudian memiliki anak dari pernikahan tersebut korban dipaksa kembali ke Vietnam mengingat pengawasan kependudukan di Tiongkok sangat ketat, terlebih lagi mengenai anak-anak yang dilahirkan. Karena pernikahan tersebut tidak tercatat secara legal di mata hukum akhirnya anak-anak hasil *marriage trafficking* tersebut tidak memiliki catatan sipil dan menjadi tidak jelas status kewarganegaraannya (Wawancara dengan Mr Le Duc Mehn, *First Secretary of Vietnam Embassy*, tanggal 3 Agustus 2016). Selain itu banyak juga korban yang terseret kedalam praktek porstitusi di Tiongkok.

Faktor penyebab terjadinya perdagangan perempuan Vietnam ke Tiongkok dapat dijelaskan melalui prespektif *socialis-feminism*. Melalui prespektif ini dapat ditarik sebuah benang merah bahwa kejahatan ini berakar pada struktur budaya patriarki yang dianut oleh Vietnam dan Tiongkok. Struktur budaya tersebut kemudian menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua di dalam masyarakat yang menyebabkan perempuan mengalami diskriminasi baik dalam bidang sosial maupun ekonomi.

Posisi Perempuan di Vietnam

Sejarah menyatakan bahwa pada masa lampau yaitu tepatnya pada tahun 1009-1225 pada periode Dynasty Ly dan *the Hong Duc Code* 1983 perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Pada masa itu perempuan memiliki hak yang sama dalam warisan, perceraian dan perlindungan dari kekerasan (JICA, 2011:7). Vietnam berubah menjadi patriarki semenjak Tiongkok mulai menguasai Vietnam dan berkat pengaruh dari kolonial *Confucianism* dan Perancis (JICA, 2011:7).

Menurut ajaran *confucianism* perempuan memiliki kewajiban untuk menghasilkan keturunan, merawat anak dan mengurus rumah. Sejak reformasi Doi Moi perempuan

diminta untuk bekerja diluar rumah setelah menikah dan melahirkan. Hal ini menyebabkan perempuan memiliki beban dua kali lipat, yaitu untuk bekerja diluar rumah dan mengurus rumah (JICA, 2011:7).

Pengaruh patriarki membuat masyarakat Vietnam lebih mengunggulkan laki-laki dari pada perempuan. Selain itu perempuan yang telah menikah akan hidup bersama keluarga suaminya dan merawat mertuanya. Jaminan sosial bagi manula yang masih rendah membuat masyarakat Vietnam lebih memilih memiliki anak laki-laki, setiap keluarga diharuskan memiliki anak laki-laki agar dimasa depan mereka dapat memperistri perempuan yang nantinya akan merawat orang tua mereka (JICA, 2011:7). Kecenderungan ini membuat keseimbangan sex ratio terganggu dan angka aborsi tinggi.

Fenomena ini menuntun para perempuan ke jurang diskriminasi. Potensi diskriminasi lainnya juga muncul dengan kenyataan bahwa 53 juta jiwa dari total penduduk Vietnam 142 juta jiwa merupakan kaum minoritas. Ancaman paling besar terhadap perdagangan manusia sebenarnya jatuh pada perempuan-perempuan yang berasal dari kelompok minoritas yang tinggal di Vietnam. Menurut NGO *Alliance Anti Traffic's* (ATT) menegaskan bahwa populasi etnis minoritas yang tersebar didaerah-daerah di Vietnam menjadi incaran para pelaku perdagangan perempuan. Di Vietnam sendiri terdapat etnis minoritas perempuan sebanyak 13,8% yang tersebar di seluruh daerah Vietnam (CEOP, 2011:10).

Pendidikan di Vietnam terbagi atas empat sektor, yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan umum (SD,SMP, SMA), pendidikan profesi (kuliah atau pelatihan kejuruan) dan perguruan tinggi. Sayangnya sebanyak 60% anak-anak dari etnis minoritas tidak dapat menyelesaikan pendidikan umum (SD,SM,SMA). Jumlah laki-laki dari etnis minoritas yang mengikuti pendidikan umum sebanyak 67,8% sedangkan perempuan hanya 61,6% saja (JICA, 2011:20). Di dalam sistem patriarki etnis minoritas perempuan hanya mendapat sedikit akses di bidang pendidikan. Menurut penelitian *Save the Children* pada tahun 2005-2006 93,5% korban memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dalam bukunya Shelley menyebutkan bahwa perdagangan manusia sering terjadi di lingkungan dimana hak-hak perempuan dibatasi, tidak memiliki hak atas warisan dan tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan laki-laki. Dalam struktur patriarki, perempuan Vietnam memiliki hak yang dibatasi dan masuk dalam urutan kedua di dalam keluarga. Selain itu perempuan juga tidak memiliki hak atas warisan di dalam keluarga.

Dari segi hukum, pemerintah Vietnam mempunyai *National Action Plan* (NPA) *on Criminal Against Woman and Children* pada tahun 2007 yang berisi 4 komponen utama, yaitu mengedukasi masyarakat mengenai perdagangan manusia; memerangi perdagangan anak dan perempuan menerima dan mendukung perempuan dan anak korban kembali dari luar negeri; mengembangkan dan memperkuat kerangka hukum dalam kaitannya dengan pencegahan; dan memerangi perdagangan pidana perempuan dan anak. Namun semua itu kembali kepada masyarakat itu sendiri (CEOP, 2011:8).

Selain itu pemerintah juga secara aktif menerapkan hukum dan kebijakan untuk menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang KDRT yang berisi tentang pencegahan dan pengendalian kekerasan dalam rumah tangga dan *Ministry of Sport, Culture and Tourism* ditunjuk sebagai badan pelaksana Undang-Undang tersebut (JICA, 2011:8).

Tradisi dan budaya yang sudah melekat pada masyarakat Vietnam membuat pola pikir masyarakat sulit untuk diubah. Belum lagi daerah-daerah pedesaan yang jauh dari jangkauan pemerintah membuat NPA sendiri tidak mencapai target yang dituju pemerintah. Banyak para pelaku langsung melakukan pendekatan pada korban maupun keluarga korban secara personal sehingga seringkali keluarga korban itu sendiri yang mengantar anaknya menjadi korban perdagangan perempuan, atau bahkan pelaku bisa saja orang

terdekat korban sehingga ancaman perdagangan manusia bagi para perempuan Vietnam benar-benar berasal dari segala arah.

Japan International Cooperation Agency (JICA) melaporkan bahwa Ancaman paling besar terhadap perdagangan manusia sebenarnya jatuh pada perempuan-perempuan yang berasal dari kelompok minoritas yang tinggal di Vietnam. Menurut NGO *Alliance Anti Traffic's* (ATT) populasi etnis minoritas yang tersebar di daerah-daerah di Vietnam menjadi incaran para pelaku perdagangan perempuan. Di Vietnam sendiri terdapat etnis minoritas sebanyak 13,8% yang tersebar di seluruh daerah Vietnam (CEOP, 2011:10). Perempuan-perempuan Vietnam seringkali mengalami eksploitasi seksual dan tenaga setelah menikah dengan laki-laki Tiongkok yang berprofesi sebagai petani di Tiongkok. Perempuan Vietnam yang menjadi korban eksploitasi tersebut banyak diantaranya yang tidak mengetahui bahwa mereka akan dinikahkan dengan laki-laki Tiongkok yang tidak mereka kenal sama sekali. Mereka biasanya merupakan korban penipuan agen-agen tenaga kerja atau bahkan korban penipuan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka. Biasanya mereka dijual sebesar 4000-5000 yen kepada laki-laki Tiongkok (JICA, 2011:39).

Rendahnya tingkat pendidikan perempuan Vietnam, terutama yang berada pada daerah pedesaan disebabkan oleh adanya tradisi dan budaya yang membuat perempuan usia 16-17 tahun merasa bahwa mereka harus ikut membantu perekonomian keluarga, yaitu dengan bekerja (CEOP, 2011:14). Begitu juga dengan para orang tua, mereka menuntut anak-anaknya untuk ikut membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini membuka lahan yang subur bagi para pelaku perdagangan perempuan dalam melancarkan aksinya.

Kondisi Perekonomian Vietnam

Jika dilihat dari segi makro, perekonomian Vietnam memang memiliki mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, namun tidak demikian jika dilihat dari segi mikro ekonomi. Menurut *First Secretary of the Socialist Viet Nam Embassy* di Indonesia, yaitu Mr Le duc Menh, seperti pada umumnya negara berkembang, pertumbuhan ekonomi Vietnam tidak terjadi secara merata, khususnya di daerah-daerah pedalaman, perbatasan serta daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Mr Menh menyebutkan daerah-daerah tersebut diantaranya Lao Cai, Quang Ninh dan Muong Khuong. (Wawancara dengan Mr Le Duc Mehn, *First Secretary of Vietnam Embassy*, tanggal 3 Agustus 2016).

Sejak reformasi *Doi Moi*, Vietnam merubah orientasi ekonominya berbasis pada orientasi pasar, yang berarti Vietnam mulai membangun pasar sebagai mekanisme koordinasi utama dalam perekonomian (Gates, 1996:213). Perubahan tersebut tentunya mempengaruhi perilaku baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta dalam memberi upah terhadap pekerjanya. Hal inilah salah satu faktor penekan buruh-buruh kecil, terutama perempuan di Vietnam. Upah yang kecil dan sulitnya mendapat pekerjaan membuat mereka mengalami himpitan ekonomi. Hal tersebut membuat masyarakat berusaha mencari pekerjaan yang lebih layak serta menghalalkan segala cara untuk dapat memperbaiki nasib atau bahkan untuk bertahan hidup.

Posisi perempuan yang awalnya hanya mengurus kebutuhan rumah tangga kini bertambah yaitu dengan bekerja pada sektor-sektor industri. Inilah yang nantinya akan mengantarkan masyarakat Vietnam kepada kejahatan perdagangan manusia yang akan banyak memakan korban perempuan. Faktor pendukung lainnya yaitu seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, perempuan usia remaja yaitu 16-17 tahun sudah terbebani oleh tanggungan ekonomi keluarga. Bahkan di Vietnam rata-rata perempuan usia 14 tahun terpaksa berhenti sekolah untuk mencari pekerjaan agar dapat menghasilkan uang bagi keluarga.

Menurut Vo Hong Phuc, *Ministry of Planning and Investment* pada tahun 2006, Vietnam sedang mengalami tantangan yang sulit dalam bidang perekonomian, yaitu berupa pembangunan yang tidak berkelanjutan, daya saing dan efektivitas yang masih rendah dan permasalahan sosial yang perlu diselesaikan. Vietnam harus mendorong proses reformasi dalam pengembangan ekonomi dan sosial, untuk memaksimalkan sumber daya untuk pertumbuhan ekonomi, dan untuk meningkatkan efektivitas serta daya saing (IMF, 2005).

Selain itu Vietnam juga memiliki masalah terhadap diskriminasi gender pada umur pensiun antara karyawan laki-laki dan karyawan perempuan. Karyawan laki-laki dapat pensiun pada usia 60 tahun sedangkan karyawan perempuan sudah diharuskan untuk pensiun pada usia 55 tahun. Selain itu perlakuan berbeda juga diterima oleh perempuan dalam hal gaji dan jaminan keamanan sosial (JICA, 2011:34). Hal ini menjadikan laki-laki memiliki penghasilan lebih tinggi dari perempuan. Gaji perempuan pada pekerjaan profesi hanya 77% dari gaji laki-laki dan gaji perempuan lulusan sarjana atau lebih hanya 62% dari gaji laki-laki (JICA, 2011:34).

Vietnam sendiri termasuk ke dalam negara yang berpenghasilan rendah, dengan ruang lingkup ekonomi yang sempit, teknologi terbelakang, biaya produksi tinggi dan daya saing rendah (IMF, 2005:2). Ada banyak isu yang tersisa di sektor sosial tertentu yaitu kualitas pendidikan dan pelatihan rendah; pengetahuan ilmiah dan penelitian teknologi belum memenuhi standar. Pendapatan dan kondisi hidup penduduk masih miskin, terutama di daerah pedesaan dan bencana alam; masalah sosial masih tetap luas; jaminan sosial di daerah-daerah tertentu belum stabil; dan reformasi administrasi dilaksanakan cenderung lambat. Masalah-masalah tersebut memiliki dampak besar pada realisasi sosio tujuan pembangunan ekonomi pada umumnya, dan khususnya, pada *the Objectives of the Comprehensive Poverty Reduction and Growth Strategy* (IMF, 2005:2).

Permasalahan ekonomi pada akhirnya berujung pada permasalahan sosial karena perekonomian sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Vietnam. Banyak masyarakat yang terjatuh hutang hingga akhirnya harus berurusan dengan para renternir. Para renternir tersebut menjerat masyarakat yang memiliki hutang dengan bunga yang tidak berkesudahan. Pada akhirnya banyak masyarakat yang memilih bekerja keluar Tiongkok untuk menutup kebutuhan ekonomi keluarga. Sudah bukan hal baru lagi bahwa perempuan memiliki pilihan pekerjaan yang relatif terbatas. Seringkali perempuannya bisa mendapatkan pekerjaan pada sektor-sektor dimana mereka rentan terhadap eksploitasi kerja dan seksual, termasuk sebagai pembantu rumah tangga, penunjang karpet, dan penyedia perawatan anak (ILO, 1995 dalam Shelley, 2010:54).

Dalam bukunya Wang menyatakan; *“Because of a limited array of economic possibilities, women and children are pushed to go abroad or the urban area in order to support or increase their own economic and social status and/or their family’s status”* (Wang, 2005:6). Seperti halnya yang terjadi di Vietnam, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menuntut penduduk-penduduk pedesaan untuk mencari lapangan kerja ke daerah perkotaan atau bahkan ke luar negeri. Pemerintah Vietnam sendiri menghimbau warga negaranya untuk mencari peluang kerja ke luar negeri karena hal ini akan mendatangkan keuntungan bagi individu itu sendiri, negara penerima dan bagi perekonomian Vietnam (CEOP, 2011:12). Banyaknya tawaran pekerjaan di luar negeri bagi perempuan membuat perempuan Vietnam khususnya yang berada di pedesaan dan minim pengetahuan mudah tertipu oleh pelaku perdagangan manusia. Terlebih lagi kondisi Tiongkok yang jauh lebih maju dan makmur dibandingkan Vietnam seringkali membuat perempuan Vietnam tergiur untuk memperbaiki nasib dirinya maupun keluarganya dengan mengadu nasib ke Tiongkok.

Masyarakat Vietnam bermigrasi ke Tiongkok dengan cara berhutang dengan agen perjalanan. UNIAP menyatakan bahwa faktor terbesar yang menjadikan para korban menjadi korban perdagangan perempuan di Tiongkok yaitu terkait dengan modus perekrutan korban terjerat hutang dengan agen penyalurnya (CEOP, 2011:13). Apabila mereka sudah terjerat hutang maka para pelaku dapat dengan mudah mengendalikan mereka. Perekrutan korban dengan menggunakan modus jeratan hutang memang banyak digunakan oleh para pelaku karena terbukti efektif dan banyak korbannya.

Orientasi perekonomian Vietnam yang berbasis pada pasar menghasilkan persaingan ekonomi menjadi sangat ketat. Lapangan kerja yang terbatas mendorong masyarakat Vietnam terutama untuk bermigrasi. Dalam sistem perekonomian yang ketat akan persaingan memang membuat perempuan menjadi pihak yang tersudut, terutama di dalam negara yang menganut sistem patriarki seperti Vietnam

Sebelum masa dinasti Shang dan Zhou, Tiongkok merupakan negara menganut baik sistem patriarki maupun sistem matriarki, bahkan perempuan cenderung mendominasi karena pada saat itu perempuan memegang kendali atas hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga dan juga mencari nafkah bersama-sama dengan laki-laki untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seiring berkembang jaman dan perubahan dari berburu dan meramu menjadi berternak dan bertani pelahan-lahan laki-laki mulai mendominasi struktur sosial di Tiongkok menggeser peranan perempuan (Chen, 2011).

Dalam bukunya yang berjudul *Human Trafficking: A Global Perspective*, Shelley menyebutkan bahwa terdapat dua faktor demografis yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia, yaitu pertumbuhan penduduk dan meningkatnya ketidakseimbangan antara jumlah perempuan dan laki-laki. Shelly menyatakan; "*In China, there are fewer women than men because many female fetuses are aborted because of the one-child policy and society's preference for males.*" (Shelley, 2010:52).

Shelley juga menyebutkan Tiongkok menjadi salah satu negara yang mengalami masalah demografis, yaitu ketidakseimbangan antara jumlah perempuan dan laki-laki. Masalah ini muncul setelah adanya kebijakan pemerintah Tiongkok yaitu *One Child Policy*, kebijakan dimana satu keluarga hanya diperbolehkan memiliki satu anak saja. Tingginya tingkat aborsi bayi perempuan karena masyarakat lebih menginginkan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan membuat jumlah perempuan dan laki-laki di Tiongkok tidak seimbang.

Budaya patriarki di Tiongkok cenderung merendahkan perempuan berdampak pada kondisi demografi masyarakat Tiongkok yang tidak ideal, yaitu ketidakseimbangan *sex ratio* jumlah perempuan dan laki-laki di Vietnam. Pada tahun 2005 laki-laki Vietnam sudah mulai kesulitan dalam menemukan perempuan untuk dinikahi. Hal ini karena 88% laki-laki usia 35 hingga 39 tahun di Tiongkok belum menikah sedangkan 99% perempuan Tiongkok sudah menikah. Jumlah ini jelas membuat laki-laki Tiongkok membutuhkan perempuan dari luar Tiongkok untuk diperistri atau untuk memenuhi hasrat kebutuhan seks mereka (*All Girls Allowed*, 2012). Kebutuhan inilah yang memicu perdagangan perempuan Vietnam ke Tiongkok karena Vietnam memiliki kedekatan geografis.

Akibat dari kebijakan *one child policy* Tiongkok menjadi negara dengan ketidakseimbangan *sex ratio* tertinggi (*The most serious gender imbalance country in the world*) yaitu dengan perhitungan 118 laki – laki di Tiongkok untuk 100 perempuan. Jumlah tersebut menembus rata – rata *sex ratio* global yaitu 107 laki – laki untuk 103 perempuan (Reuters, 2010). Selain itu pada kenyataannya tidak semua laki – laki dan wanita di Tiongkok berada dalam usia yang sama, kebanyakan dari wanita tersebut sudah memasuki usia tidak lagi produktif. Menurut data yang dikutip dari CNN pada tahun 2020 akan ada 30 juta laki – laki mencapai usia dewasa dan akan memasuki pasar Tiongkok (CNN News, 2010).

Dalam bukunya Shelley menyebutkan bahwa ketidakseimbangan gender merupakan sebab dan akibat dari perdagangan manusia. Banyak perempuan Asia yang diperdagangkan untuk dijadikan istri laki-laki Tiongkok; “*The gender imbalance is both a cause and a consequence of human trafficking. Women are trafficked from other Asian countries as wives for Chinese men*” (Shelley, 2010:52). *The United Nation Inter-Agency Project on Human Right* (UNIAP) menyatakan bahwa ketidakseimbangan *sex ratio* Tiongkok merupakan salah satu pemicu terjadinya *human trafficking* di Vietnam.

Terdapat dua jenis eksploitasi yang paling sering diterima oleh perempuan yang diperdagangkan ke Tiongkok, yaitu pernikahan paksa dan prostitusi. Jumlah perempuan dan laki-laki di Tiongkok yang tidak seimbang membuat laki-laki Tiongkok kesulitan untuk menemukan pasangan dan pada akhirnya memilih untuk membeli perempuan yang dapat mereka nikahi; “*The two most common exploitation types in the cases of women and children exploited in China were forced marriage and prostitution, with labour exploitation and domestic servitude also significant*” (CEOP, 2011:23). Perempuan Vietnam sendiri dijual dengan harga ¥5000 hingga ¥5500 (CEOP, 2011:23). Membeli perempuan Vietnam biasanya menjadi jalan pintas bagi laki-laki Tiongkok dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang ingin menikah.

Laki-laki Tiongkok lebih memilih membeli perempuan Vietnam untuk dijadikan istri karena uang yang harus dibayarkan jauh lebih murah daripada menikahi perempuan Tiongkok. Apabila laki-laki Tiongkok ingin menikahi perempuan Tiongkok mereka harus membayar *dowry* (mas kawin) kepada keluarga perempuan dengan sangat mahal. Berikut daftar harga mas kawin yang harus dibayar oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan di Tiongkok.

Kesimpulan

Perdagangan perempuan Vietnam merupakan suatu dalam kejahatan transnasional karena kejahatan ini melibatkan Tiongkok sebagai negara tujuan. Mulai tahun 2005 hingga 2009 angka perdagangan perempuan Vietnam ke Tiongkok mencapai titik tertinggi, yaitu sejumlah 60% dari total perdagangan perempuan Vietnam.

Masyarakat Vietnam menganut sistem patriarki sehingga mereka cenderung menempatkan perempuan pada posisi kedua. Perempuan mempunyai tugas ganda, terlebih lagi setelah adanya reformasi Doi Moi, yaitu harus mengurus rumah tangga dan bekerja menafkahi keluarga. Sempitnya lapangan pekerjaan di Vietnam membuat banyak perempuan yang memutuskan untuk bermigrasi ke Tiongkok untuk mencari pekerjaan, namun sayangnya rendahnya tingkat pendidikan perempuan Vietnam membuat mereka rawan menjadi korban penipuan dan akhirnya menjadi korban perdagangan perempuan.

Kondisi perekonomian Vietnam pun tidak banyak menguntungkan para perempuan tersebut. Banyak diskriminasi yang dialami oleh perempuan dalam bidang perekonomian, seperti perbedaan usia pensiun dan perbedaan jumlah gaji. Hal ini menyebabkan perempuan tidak diuntungkan dari segi budaya maupun perekonomian. Terlebih lagi masalah demografis yang dialami Tiongkok juga turut menjadi faktor penyebab terjadinya perdagangan perempuan ke Tiongkok. Budaya patriarki di Tiongkok telah menyebabkan ketidakseimbangan *sex ratio* dimana jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal ini menyebabkan jumlah perempuan Tiongkok terbatas dan akan sangat mahal apabila laki-laki Tiongkok akan menikahi perempuan Tiongkok juga.

Referensi:

- All Girls Allowed. 2011. "Gender Imbalance in China". Tersedia dalam: <<http://www.allgirlsallowed.org/gender-imbalance-china-statistics>>, diakses tanggal 1 September 2016.
- Amer, Rames. 2010. "Vietnam in 2009: Facing the Global Recession", *Asian Survey*, Vol. 50, No. 1, 2010, pp. 211-217.
- BBC. n.d. "Geography: Managing Population Change, Case Study China". Tersedia dalam: <http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/population/managing_population_rev3.shtml>, diakses 2 September 2016.
- BBC. 2014. "China Police investigate 'vanished' Vietnamese Brides". Tersedia dalam: <http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/population/managing_population_rev3.shtml>, diakses tanggal 18 Juni 2015.
- Baulch, Bob dan Vu Hoang Dat. 2007. "Poverty Dynamics in Vietnam 2002-2006". Tersedia dalam: <<http://documents.worldbank.org/curated/en/309531468267611416/pdf/642780WP0P107600Box0361535B0PUBLIC0.pdf>>, diakses tanggal 30 Agustus 2016.
- Beeks, Karen and Delila Amir. 2006. *Trafficking & The Global Sex Industry*. Lanham: Rowman & Littlefield Publisher, Inc.
- Children Exploitation and Online Protection Centre. 2011. *The Trafficking of Woman and Children from Vietnam*, British Embassy.
- Chuang, Janie. 2006. "Beyond a Snapshot: Preventing Human Trafficking in the Global Economy", *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 13, No. 1, 2006, pp. 137-163.
- Ding, Qu Jian. 2000. "Family size, fertility preferences, and sex ratio in China in the era of the one child family policy: results from national family planning and reproductive health survey". Tersedia dalam: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1550484/>>, diakses tanggal 12 Juni 2015.
- Dougherty, Julia. n.d. "An Analysis of human trafficking for sexual eksploitasi in Vietnam". Tersedia dalam: <https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Julia_Dougherty.pdf>, diakses tanggal 30 Agustus 2016.
- Japan International Cooperation Agency. 2011. *Country Gender Profile: Viet Nam (Final Report)*, O.P.C Corporation, Januari.
- Moor, Malcom. 2014. "What is China One Child Policy" tersedia dalam: <<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/11197594/What-is-Chinas-one-child-policy.html>>, diakses tanggal 15 Juni 2015
- No Trafficking. 2009. "The Trafficking & Migration Situation in Vietnam". Tersedia dalam: <<http://www.no-trafficking.org/vietnam.html?bm8td=68135>>, diakses tanggal 10 Juni 2015.
- Parreñas , Rhacel Salazar, Maria Cecilia Hwang and Heather Ruth Lee. 2012. "What is Human Trafficking? An Review Essay", *Sex: a Thematic Issue*, Vol. 37, No. 4, 2012, pp. 1015-1029.
- Shelley, Louise. 2010. *Human Trafficking: A Global Prespective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- UNIAP in Human Trafficking. 2011. *Human Trafficking Sentinel Surveillance: Viet Nam-China Border 2010*, UNIAP.
- US Departement of States. 2006. *Trafficking in Person Report 2005*, Juni.
- US Departement of States. 2007. *Trafficking in Person Report 2006*, Juni.

- US Department of States. 2008. *Trafficking in Person Report 2007*, Juni.
- US Department of States. 2009. *Trafficking in Person Report 2008*, Juni.
- US Department of States. 2010. *Trafficking in Person Report 2009*, Juni.
- US Government Printing Office. 2006. *Hearing before the The Congressional-Executive Commission on China*, Maret.
- United Nation. 1948. "The Universal Declaration of Human Right". Tersedia dalam: <<http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>>, diakses tanggal 9 Juni 2015.
- UNIAP Vietnam. n.d. "The Trafficking & Migration Situation in Vietnam". Tersedia dalam: <<http://www.no-trafficking.org/vietnam.html?bm8td=68135>>, diakses tanggal 10 Juni 2015.
- United Nations. 2000. "Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, article 3(a), 2000", Tersedia dalam: <<http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/>>, diakses tanggal 27 Januari 2016.
- Wang, Yi. 2005. *Trafficking in Woman and Children from Vietnam to China: Legal Framework and Government Responses*, Oxfam, Agustus.
- Wee, Sui-Lee. 2015. "China Gender Imbalance 'Most Serious' in The World ". Tersedia dalam: <<http://chinadigitaltimes.net/2015/01/china-gender-imbalance-serious-world/>>, diakses tanggal 9 Juni 2015.
- World Bank. 2016. "Country Brief, Vietnam". Tersedia dalam: <<http://www.worldbank.org/en/country/vietnam>>, diakses tanggal 26 Januari 2016.
- Yuan, Alexander F. 2013. "Forget dowries: Chinese men have to pay up to \$24,000 to get a bride". Tersedia dalam: <<http://qz.com/92267/in-a-reversal-of-the-dowry-chinese-men-pay-a-steep-price-for-their-brides/>>, diakses tanggal 7 September 2016.